

**PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN  
*GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING**

**SKRIPSI**

**PUTRI DWI RAHMADANI**

**NIM : 18622125**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN  
*GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi

**OLEH :**

**PUTRI DWI RAHMADANI**

**NIM : 18622125**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN *GOOD***  
***GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**  
**SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Diajukan kepada :

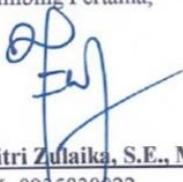
Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : PUTRI DWI RAHMADANI  
NIM : 18622125

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA.  
NIDK. 8935830022

Pembimbing Kedua,



Afrivadi, S.T., M.E.  
NIDN. 1003057101/Asisten Ahli

Menyetujui,  
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak  
NIDN. 1015069101/ Lektor

**Skripsi Berjudul**

**PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : PUTRI DWI RAHMADANI  
NIM : 18622125

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Puluh Dua Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

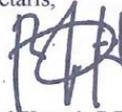
**Panitia Komisi Ujian**

Ketua,



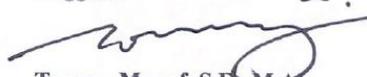
Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA.  
NIDN. 1028117701

Sekretaris,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 1004117701/Lektor

Anggota,



Tommy Munaf, S.E., M.Ak.  
NIDN.1016048202/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA.  
NIDN. 1029127801 / Lektor

### PERNYATAAN

Nama : Putri Dwi Rahmadani  
NIM : 18622125  
Tahun Angkatan : 2018  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,84  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022  
Penvusun.



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI  
PENDAPAT  
E970740X100430730

**Putri Dwi Rahmadani**  
NIM. 18622125

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Allah, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku kasihi dan sayangi*

### **Papa dan Mama Tercinta**

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hingga, saya persembahkan karya kecil ini untuk papa dan mama yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia.

### **Sahabat-Sahabat Pejuang Skripsi**

Untuk sahabat-sahabatku sekalian, tiada yang paling menyenangkan saat kumpul akur bersama, walaupun terkadang kita berselisih paham namun hal tersebut akan selalu memberi warna yang tidak akan pudar terbawa zaman. Terima kasih bantuan dan dukungannya.

## **HALAMAN MOTTO**

*“Hidup itu seperti mengendarai sepeda, harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Apapun yang terjadi, hadapi”*

**Albert Einstein**

*“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**(Q.S. Al Baqarah : 286)**

*~A Beautiful Day Begins With A Beautiful Mindset~*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. selaku Wakil Ketua II Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E.,M.Ak.Ak.,CA. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas memberikan arahan, saran, perbaikann serta semangat dalam membimbing proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Afriyadi, S.T.,M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh penulis.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf secretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Untuk kedua orang tuaku yaitu ayah Rahmat dan ibunda Zuraida yang telah mendukung melalui doa, nasehat, motivasi, dan pengorbanan materil selama ini yang tidak ternilai pengorbanannya untuk memudahkan jalanku.
10. Untuk kakakku Desy Hangryainy Puspita Sari dan adikku Raidah Adelia Syifa yang telah membantu doa serta dukungan sehingga skripsi dapat penulis selesaikan.
11. Seluruh teman-teman, kelas Akuntansi Malam 3 angkatan 2018, kelas Akuntansi Sore angkatan 2018, dan Anggota KKN 21 Tahun 2021 serta semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan memberikan masukannya kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan karya tulis ini berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa-mahasiswi jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 19 Juli 2022

Penulis

**Putri Dwi Rahmadani**

**NIM. 18622125**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	16
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	21
2.1.4 <i>Good Governance</i> .....	26
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal.....	29
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	32

2.3	Kerangka Pemikiran .....	37
2.4	Hipotesis .....	38
2.5	Penelitian Terdahulu .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>50</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	50
3.2	Jenis Data .....	50
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4	Populasi dan Sampel.....	51
3.4.1	Populasi.....	51
3.4.2	Sampel .....	51
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	53
3.6	Teknik Pengolahan Data .....	57
3.7	Teknik Analisis Data .....	59
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>65</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	65
4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
4.1.2.	Gambaran Umum Karakteristik Responden .....	66
4.1.2.1.	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ..	67
4.1.2.2.	Karakteristik responden berdasarkan usia .....	68
4.1.2.3.	Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan.....	68
4.1.2.4.	Karakteristik responden berdasarkan jabatan .....	69
4.1.2.5.	Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.....	69
4.1.3.	Statistik Deskriptif.....	70
4.1.4.	Uji Kualitas Data .....	72
4.1.4.1.	Uji Validitas .....	72
4.1.4.2.	Uji Reliabilitas.....	74
4.1.5.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	75
4.1.5.1.	Uji Normalitas .....	75

4.1.5.2. Uji Multikolinieritas .....	77
4.1.5.3. Uji Heteroskedastisitas .....	78
4.1.6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	80
4.1.7. Hasil Uji Hipotesis .....	82
4.1.7.1. Uji t .....	82
4.1.7.2. Koefisien Determinasi .....	84
4.1.8. Hasil Uji Regresi Moderasi Pendekatan Uji Interaksi.....	85
4.2. Hipotesis .....	88
4.2.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	88
4.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	89
4.2.3. Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	90
4.2.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	91
4.2.5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	92
4.2.6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Memoderasi <i>Good     Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1. Kesimpulan .....	95
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	97
5.3. Saran .....	97
5.3.1. Bagi Pemerintah .....	97
5.3.2. Bagi Peneliti Selanjutnya .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
***CURRICULUM VITAE***

## DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Daftar Jumlah Sampel Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	52
2.	Definisi Operasional Variabel.....	53
3.	Data Distribusi Kuesioner.....	67
4.	Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	67
5.	Karakteristik Usia Responden .....	68
6.	Karakteristik Jenjang Pendidikan Responden.....	68
7.	Karakteristik Jabatan Responden .....	69
8.	Karakteristik Pekerjaan Responden .....	69
9.	Statistik Deskriptif Variabel .....	70
10.	Uji Validitas .....	72
11.	Uji Realibilitas .....	74
12.	Hasil Pengujian Normalitas .....	77
13.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	78
14.	Grafik <i>Scatterplot</i> .....	79
15.	Hasil Uji <i>Spearman rho</i> .....	79
16.	Hasil Persamaan Regresi .....	81
17.	Hasil Uji Parsial .....	83
18.	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	84
19.	Hasil Uji Koefisien Determinasi - Regresi Moderasi.....	85
20.	Hasil Uji t - Regresi Moderasi .....	85

## **DAFTAR GAMBAR**

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Opini atas LKPD Tahun 2020.....	2
2.	Unsur SPIP.....	32
3.	Kerangka Pemikiran .....	37
4.	Histogram Uji Normalitas.....	75
5.	Persebaran Data.....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Kuesioner
Lampiran 2	: Tabel Jawaban Responden
Lampiran 3	: Hasil Pengujian SPSS
Lampiran 4	: Dokumentasi
Lampiran 5	: Surat Pernyataan Izin Penelitian
Lampiran 6	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran 7	: Persentase Plagiat
Lampiran 8	: <i>Curriculum Vitae</i>

## ABSTRAK

### PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Putri Dwi Rahmadani. 18622125. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.  
[putridwirahmadanipdr@gmail.com](mailto:putridwirahmadanipdr@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan staf penatausahaan keuangan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 123 responden.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi dengan variabel moderating yang diolah dengan bantuan program SPSS 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating serta *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating.

**Kata kunci** : Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal.

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II : Afriyadi, S.T., M.E.

## **ABSTRACT**

### ***THE EFFECT OF APPLYING GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, COMPETENCE HUMAN RESOURCES, AND GOOD GOVERNANCE OF THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS TO THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AS MODERATING VARIABLE.***

Putri Dwi Rahmadani. 18622125. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang. [putridwirahmadanipdr@gmail.com](mailto:putridwirahmadanipdr@gmail.com)

*This study aims to obtain empirical evidence about the effect of applying government accounting standards, competence human resources, and good governance of the quality of financial statements to the internal control system as moderating variable. The population in this study were employees in the regional work units (SKPD) Provincial Government of Riau Islands. Sampling was done by purposive sampling were financial administrative personal, treasurers, and staf financial administrative in the regional work amounted to 123 respondent.*

*The research method used ia a quantitative research method with primary data obtained from questionnaire data which is measured using a likert scale. Analysis of the data used in this research is regression with moderating variables and processed with the help of SPSS 22.*

*The results of this study indicate that the effect of applying government accounting standards has a positive siginificant effect on the quality of financial reports of local government, competence human resources has a positive siginificant effect on the quality of financial reports of local government, good governance has a positive siginificant effect on the quality of financial reports of local government, and the effect of applying government accounting standards has a siginificant effect on the quality of financial reports of local government with the internal control system as a moderating variable, competence human resources has a siginificant effect on the quality of financial reports of local government with the internal control system as a moderating variable, and good governance has a siginificant effect on the quality of financial reports of local government with the internal control system as a moderating variable.*

**Keywords** : *Government Accounting Standards, Competence Human Resources, Good Governance, Quality of Financial Statements, Internal Control System*

Supervisor I : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak.,CA.

Supervisor II : Afriyadi, S.T., M.E.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

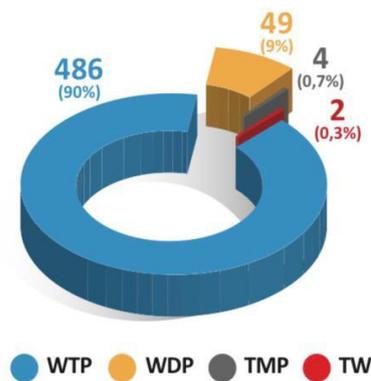
### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Munculnya paradigma baru pada pengelolaan keuangan daerah memicu timbulnya tuntutan dari masyarakat akan adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan ialah perubahan mendasar dalam konsep *financial administration* menjadi *financial management*, semangat melandasi pengelolaan keuangan adalah *let the managers manage* dan konsep pengendalian keuangan negara yaitu *check and balance mechanism* (Trisulo, 2017). Instrumen pelaporan pada paradigma baru ini harus didukung tersedianya lampiran atas laporan keuangan dan akan dipertanggungjawabkan dan dievaluasi dengan diberlakukannya audit oleh eksternal auditor terhadap laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan dan disampaikan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan wajib mengandung informasi berkualitas yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam mengambil suatu kebijakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas ialah laporan keuangan yang memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 486 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 49 LKPD (9%), opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 4 (0,7%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 2 (0,3%) LKPD seperti tersaji pada gambar 1.1. Hal ini berdampak baik karena menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan tata kelolaan keuangan daerah sudah transparan dan akuntabel. Kenaikan kualitas laporan keuangan ini juga didukung dengan adanya perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang terjadi tahun sebelumnya.

**Gambar 1. 1 Opini atas LKPD Tahun 2020**



**Sumber : [www.bpk.go.id/ihps](http://www.bpk.go.id/ihps)**

Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan 2021. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam menyajikan Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi, dan evaluasi kinerja (Pebriani, 2019). Penerapan SAP pada laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan yang lebih baik serta berdampak pada laporan keuangan menjadi berkualitas.

Keberhasilan dan kesuksesan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tentunya didukung oleh kompetensi aparatur yang berkualitas. Kompetensi aparatur yang berkualitas didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Nuraini *et al.*, 2019). Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap) (Pebriani, 2019).

Menurut Aminy *et al.* (2021) pengelolaan keuangan negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus diterapkan tata kelola keuangan dengan baik dan benar. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Aminy *et al.* (2021) mengemukakan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara (*state*), sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Berdasarkan hasil penelitian Azlim *et al.* (2012) membuktikan bahwa penerapan *good governance* mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dijadikan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dengan diterapkan *good governance* diharapkan dapat berimplikasi pada tata kelola keuangan daerah, sehingga mampu menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (Farikhoh, 2019).

Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara umum tujuan dari diterapkannya sistem pengendalian internal

yang baik berguna untuk meminimalisir terjadinya laporan keuangan yang salah saji dan terhindar dari kecurangan (Sudarmanto & Utami, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya antara variabel independen dan variabel dependen ditemukan adanya beberapa *research gap*. Dimana hasil riset menunjukkan inkonsisten, beragam, dan belum konklusif. Pada penelitian Pebriani (2019) penerapan SAP berpengaruh positif dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesuma et al (2017) yaitu SAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian pada indikator kompetensi sumber daya manusia, berdasarkan hasil riset Redjo (2020) kompetensi sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan diperoleh bahwa sumber daya manusia menunjukkan pola positif yaitu berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sudaryati & Heriningsih (2014) yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sementara pada hasil riset Kesuma et al (2017) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan secara parsial dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian pada penerapan *good governance* berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Hosana et al (2021) menunjukkan hasil positif yaitu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil riset tersebut tidak sejalan dengan Kesuma et al (2017) yaitu menunjukkan pola hubungan negatif.

Adanya beberapa *research gap* menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ulang terkait variabel tersebut dengan objek SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti berspekulasi adanya variabel lain yang berpengaruh atau memoderasi variabel independen dan dependen. Untuk itu dipilih variabel moderating Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk menjawab inkonsisten hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dipilih sebagai variabel moderasi didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) hal ini dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya keandalan pelaporan keuangan. Kemudian dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Kemudian dengan mempertimbangkan opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menggunakan empat kriteria utama, yaitu pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kedua kecukupan pengungkapan yang diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keempat efektivitas sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan

BPK pada semester I tahun 2021 ditemui permasalahan antara lain pelemahan sistem pengendalian internal yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan opini audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) beberapa daerah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Berdasarkan temuan tersebut mendukung sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada penelitian ini.

Dengan ditemukannya beberapa *research gap* peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan serta bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memoderasi pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan *good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu peneliti merumuskan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, peneliti menarik beberapa masalah yang akan diangkat dan dibahas yaitu :

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

3. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan variabel Sistem Pengendalian Internal sebagai pemoderasi?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan variabel Sistem Pengendalian Internal sebagai pemoderasi?
6. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan variabel Sistem Pengendalian Internal sebagai pemoderasi?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan meneliti pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Untuk menguji secara empiris *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

4. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
5. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
6. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Bagi Akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari penelitian ini.

#### **2. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini disajikan secara komprehensif sehingga dapat menambah wawasan penulis baik segi teoritis maupun konseptual.

#### **3. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam membuat dan menentukan suatu kebijakan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan *sampling*, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang didapatkan peneliti dari lapangan tentang pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderating.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah pada bab sebelumnya, serta memberikan saran mengenai perbaikan yang mungkin perlu dilakukan oleh pihak pemerintah setempat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan laporan keuangan ialah laporan yang tersistematis mengenai transaksi-transaksi dan posisi keuangan yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan terbagi atas *budgetary report* (laporan pelaksanaan anggaran) dan laporan finansial.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selama satu periode pelaporan. Secara khusus tujuan pelaporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang digunakan. Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada (Mulia, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut :

### 1. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk dan istilah yang dapat mudah dipahami oleh pengguna informasi. Pengguna informasi disini yaitu individu yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi dan memiliki kemauan untuk mempelajari hal tersebut. Sehingga diasumsikan individu tersebut ahli dalam bidang akuntansi pemerintahan.

### 2. Relevan

Informasi yang dihasilkan memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, dan lengkap. Informasi dapat dikatakan relevan jika dapat memengaruhi keputusan yang digunakan dan juga dapat mengevaluasi suatu keputusan jika terdapat problematika baik pada masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Relevan informasi ini nantinya akan berguna dalam peramalan dan penegasan yang keduanya memiliki suatu keterkaitan hubungan.

### 3. Keandalan

Informasi yang dihasilkan harus disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, serta netral. Informasi yang memuat keandalan di dalamnya tidak akan berdampak dalam menyesatkan pembaca atau pengguna informasi. Keandalan ini sangat urgensi dan dapat memengaruhi relevansi, jika informasi atas laporan keuangan dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi dapat menyesatkan.

#### 4. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode waktu seperti mengguankan analisis *trend* dan antar unit pemerintahan. Hal ini bertujuan sebagai bahan evaluasi kinerja dan menerapkan konsistensi antar periode.

Laporan keuangan yang disajikan harus memuat:

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran (*Budgetary Reports*)

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup yaitu : Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

##### 2. Pelaporan Finansial (*Financial Reports*)

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup yaitu pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- c. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK meliputi penjelasan rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Informasi terkait kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainnya yang diharuskan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang didalamnya memuat prinsip-prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator dari kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: 1. Relevan, dimana relevan dinilai melalui unsur-unsur memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap, dan *feedback value*; 2. Andal, dimana suatu laporan dikatakan andal jika memenuhi karakteristik netralitis, mampu diverifikasi, dan penyajian yang jujur ; 3. Dapat dibandingkan, disini laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya; 4. Dapat dipahami,

yaitu pengguna laporan keuangan mampu untuk membaca dan memahami laporan tersebut dan bentuk dan istilah informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan akuntansi pemerintahan. Dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah disepakati, maka laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Putu *et al.*, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam anggaran negara/daerah.

Karakteristik pokok Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ialah :

#### **1. 17 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pernyataan standar meliputi PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 5 tentang Akuntansi

Persediaan, PSAP 6 tentang Akuntansi Investasi, PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan, dalam PSAP ini dijelaskan bahwa kesalahan berulang dan sistemik tidak perlu koreksi hanya dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan, koreksi kesalahan periode-periode yang lalu yang mempengaruhi posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan, dan koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Kemudian pada perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CALK.

PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP 12 tentang Laporan Operasional, PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, PSAP 14 tentang Aset Tak Berwujud, PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan, PSAP 16 Perjanjian Konsensi Jasa dan Pemberi Konsensi, dan PSAP 17 Properti Investasi.

PSAP dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan beberapa Buletin Teknis sebagai berikut:

1. Buletin Teknis 01 tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat
2. Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah
3. Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ssesuai dengan SAP dengan konversi
4. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
5. Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan (telah diganti dengan bultek 18)
6. Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang (telah diganti dengan bultek 16)
7. Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir
8. Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang (telah diganti dengan bultek 22)
9. Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap (telah diganti dengan bultek 15)

10. Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
11. Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (telah diganti dengan bultek 17)
12. Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing
13. Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah
14. Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas
15. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua
16. Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua
17. Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua
18. Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua
19. Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua
20. Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah
21. Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua
22. Buletin Teknis 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrua
23. Buletin Teknis 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan
24. Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan

Adapun Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan PSAP. KSAP telah menerbitkan IPSAP, yaitu:

1. Interpretasi SAP 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing

2. Interpretasi SAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
3. Interpretasi SAP 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
4. Interpretasi SAP 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Adapun Indikator penilaian penerapan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu dengan berpedoman pada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh pembuat standar serta penyusun, pemeriksa, dan pemakai laporan yaitu :

1. Basis Akuntansi, yaitu basis akrual untuk finansial dan basis kas untuk pelaksanaan anggaran;
2. Nilai Historis, Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Realisasi, pendapatan dan belanja diakui pada saat sudah diotorisasi melalui anggaran dan juga telah menambah atau mengurangi kas ;

4. Substansi, penyajian disajikan dengan substansi bukan hanya karena formalitas saja ;
5. Perioditas, laporan keuangan disajikan dalam periode waktu berjalan dengan tujuan dapat membandingkan dan menilai kinerja entitas ;
6. Konsistensi, menerapkan perlakuan akuntansi secara konsisten tiap periode waktu berjalan ;
7. Pengungkapan lengkap, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan lengkap;
8. Penyajian wajar, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan ketepatan yang berlaku.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang luas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki keterampilan yang bagus, sikap yang baik dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Wulandari, 2018).

Menurut Gasperz (2019) kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang didelegasikan padanya dengan dukungan pengalaman, pelatihan, dan pendidikan yang cukup. Di dalam aspek bidang pengelolaan keuangan dibutuhkan

pelatihan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan karena jika tidak dilakukan pembenahan dalam proses pengelolaan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan dirasa kurang akuntabel. Salah satu pelatihan yang dapat dilakukan untuk melakukan pembenahan di bidang pengelolaan keuangan yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan menyangkut sistem yang berlaku agar terciptanya pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, profesional, dan akuntabel serta transparan sehingga risiko salah saji dapat diminimalisir.

Menurut Spencer & Spencer dalam Putri (2015) terdapat lima karakteristik kompetensi sebagai berikut :

1. Motif

Motif adalah sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten sehingga ia bertindak. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan memilih perilaku terhadap tindakan atau tujuan lainnya.

2. Sifat

Sifat adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Perasaan yang timbul seperti ketakutan dalam membuat kesalahan akan membuat seorang individu takut untuk melakukan pengembangan kemudian perasaan selalu berpikir negatif terhadap seseorang, dan juga pengalaman masa lalu yang selalu negatif akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga para pegawai dapat

mengontrol emosinya yang nantinya akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi individu tersebut.

### 3. Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu. Ketika seorang individu memiliki keahlian yang memadai dan dapat diterapkan dalam menjalankan tugasnya serta keahlian tersebut dikembangkan maka keahlian tersebut dapat menciptakan suatu kompetensi bagi individu tersebut. Kemudian keterampilan tersebut dikembangkan dengan baik dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang dimiliki organisasi tersebut merupakan SDM yang berkompeten dan ahli di bidangnya

### 4. Konsep diri

Konsep diri adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui *value* yang dimiliki seseorang. Percaya diri adalah keyakinan seseorang bahwa ia dapat bertindak secara efektif dalam situasi apapun merupakan bagian dari konsep diri seseorang.

### 5. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Kapasitas pengetahuan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap kompetensi individu tersebut. Kompetensi bergantung juga pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Perbedaan kemampuan berpikir secara konseptual dan berpikir secara analitis antara satu sama lain akan

menciptakan suatu perbedaan kompetensi individu dalam memutuskan suatu keputusan, kompetensi perencanaan dan lain sebagainya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor utama dan faktor kunci bagi instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan publik. Untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik, pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, kompeten dan mampu berkinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sejahtera menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Instansi Pemerintah. Tuntutan PNS harus memiliki kompetensi antara lain: tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik, pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance), dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Mempertimbangkan kondisi dan tuntutan sebagaimana tersebut di atas maka dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Indonesia, Standar Kompetensi ASN

adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi ASN terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dipengaruhi beberapa faktor salah satunya yaitu oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi publik terutama pada negara demokrasi, peran sumber daya manusia lebih diprioritaskan pada kemampuan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, sehingga organisasi memiliki reputasi kinerja yang positif, unggul, dan akuntabel dalam pandangan masyarakat. Oleh sebab itu, kompetensi sumber daya manusia pada setiap level manajemen menjadi suatu hal yang sangat penting.

Adapun Indikator kompetensi sumber daya manusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Standar Kompetensi ASN terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat pendidikan pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Untuk kompetensi teknis dapat dinilai

pada aspek pengetahuan, kompetensi manajerial dapat dinilai pada aspek keterampilan dan kompetensi sosial kultural dapat dinilai pada aspek perilaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Indonesia, Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Sesuai dengan pernyataan terkait Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara maka indikator dalam pengukuran ini yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

#### **2.1.4 Good Governance**

*United Nations Development Program (UNDP)* mendefinisikan *Good Governance* pada dokumen yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*” sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Istilah ini sering disebut dengan pemerintahan yang baik.

*Good Governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2016). Sementara menurut Junyantara & Samtika Putra (2021) tata kelola pemerintah yang baik yaitu tata kelola yang

dilakukan secara transparan dari proses penyusunan laporan keuangan, proses pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang disusun.

Menurut Sedamaryanti (2004) dalam Pasapan (2016) memiliki empat prinsip pemerintahan yang baik dengan menerapkan empat unsur utama dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Akuntabilitas

Mengandung arti aparaturnya berkewajiban bertanggungjawab, dan penanggungjawab atas kebijakan dan segala tindakan yang ditetapkannya.

2. Transparasi

Kepemerintahan transparan kepada rakyat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Keterbukaan

Prinsip yang memberlakukan adanya keterbukaan untuk rakyat melakukan kritik dan mengajukan tanggapan terhadap pemerintah yang tidak transparan.

4. Aturan Hukum

Kepemerintahan yang baik memiliki jaminan hukum dan rasa keadilan masyarakat pada setiap kebijakan publik yang berlaku.

Adapun Indikator penilaian *good governance* berdasarkan *United Nations Development Program (UNDP)*:

1. Partisipasi

Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang sudah dibentuk untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

## 2. Supremasi Hukum

Aturan-aturan hukum dan perundang-undangan harus berlandaskan keadilan serta harus ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.

## 3. Transparansi

Adanya kebebasan aliran informasi.

## 4. Cepat Tanggap

Setiap institusi prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani pihak yang berkepentingan.

## 5. Membangun Konsensus

Pemerintah akan bertindak sebagai moderator hal ini untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi setiap pihak.

## 6. Kesetaraan

Pemerintah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki atau perempuan untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

## 7. Efektif dan Efisien

Setiap proses kegiatan atau kelembagaan ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari sumber yang tersedia.

## 8. Bertanggungjawab

Pengambil keputusan berkewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat umum.

## 9. Visi Strategi

Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

## 10. Saling Keterbukaan

Pemerintahan yang memiliki ciri saling berikatan dan saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri.

### **2.1.5 Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Ferri *et al*, (2020) Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dilaksanakan Kepala Daerah atau kepala instansi yang digunakan untuk memberikan kepastian dalam pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Internal dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern, para Gubernur mempercepat

efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup dan tugas masing-masing. Dengan mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi.

Adapun Indikator Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SPIP terdiri atas lima unsur yang akan menjadi indikator penilaian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- c. Analisis Risiko

Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan mencakup :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat melalui

##### a. Sarana Komunikasi

Seperti menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

##### b. Sistem Informasi

Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

**Gambar 2. 1 Unsur SPIP**



Sumber : [qms.pom.go.id](http://qms.pom.go.id)

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

Dari beberapa variabel yang diteliti pada penelitian ini dapat dijelaskan pola hubungan untuk masing - masing variabel independen dengan variabel dependen yaitu :

### **2.2.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara mutlak di pemerintahan Indonesia mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Rahmawati *et al.* (2018) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Suatu pelaporan keuangan berkualitas dibuat dengan mengacu oleh prinsip dan aturan yang terdapat di dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga suatu laporan keuangan pemerintah daerah haruslah mengacu pada SAP keuangan yang telah ditetapkan (Ikriyati & Aprilia, 2019).

### **2.2.2 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Mahardini & Miranti (2018) seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif, dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Sumber Daya Manusia yang berkompeten akan berpengaruh terhadap pemahaman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan pemahaman yang baik terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghindarkan dari salah saji material sehingga tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Oleh

karena itu Sumber Daya Manusia yang berkompeten diperlukan agar dapat kontribusi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Nikke Yusnita Mahardini & Miranti, 2018).

Menurut Irafah *et al.* (2020) kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Untuk melihat suatu organisasi pemerintah memiliki SDM yang berkompeten dapat dilihat dari hasil audit BPK-RI terkait LKPD dan juga pelaporan yang tepat waktu kepada BPK-RI hal ini menunjukkan Sumber Daya Manusia sudah mahir dan terampil dalam menyelesaikan dan menyajikan laporan keuangan (Irafah *et al.*, 2020)

### **2.2.3 Hubungan *Good Governance* dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Philadelphia *et al.* (2020) *Good Governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintahan daerah dengan para pengguna informasi keuangan pemerintah (*principal*) diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi meningkat (Philadelphia *et al.*, 2020). Oleh karena itu dengan menerapkan *Good Governance* maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

#### **2.2.4 Hubungan Sistem Pengendalian Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem Pengendalian Internal mengupayakan adanya jaminan ditaatinya peraturan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Hal tersebut berdampak pada kualitas dari laporan keuangan yang disusun, dimana pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan menerapkan SPI yang baik sehingga laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka akan dapat menghasilkan output yaitu berupa LKPD yang berkualitas.

Penelitian Pilander *et al.* (2018) yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah 0,288, artinya adanya sistem pengendalian internal laporan keuangan pemerintah meningkat 28,8%. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Hasil ini juga didukung dengan hasil perhitungan nilai t hitung  $6,592 > t$  tabel 1,985. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2015) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **2.2.5 Hubungan Sistem Pengendalian Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Ketidakcakapan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, selain itu sumber daya manusia yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Triwardana, 2017).

Dengan adanya SPIP dalam manajemen sumber daya manusia di pemerintah daerah, maka akan ada pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk tiap-tiap bagian di dalam organisasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa masing-masing aparatur sipil negara dalam suatu bidang atau departemen tertentu akan mengerti dan memahami mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang apa saja yang dilaksanakan. Karena tujuan dari SPIP yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi. Sehingga ketika SPIP diterapkan maka aparatur sipil negara akan secara efektif dan efisien mencapai sasaran dan tujuan dari organisasi pemerintah daerah. Dalam penempatan aparatur sipil negara harus sesuai dengan keahliannya demi meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga diperkuat dengan penerapan SPIP.

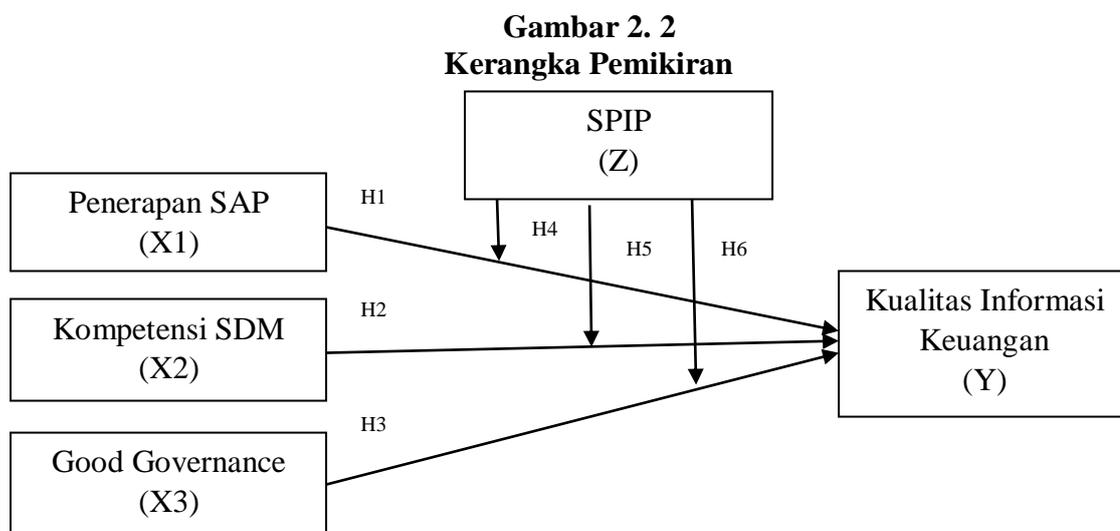
### **2.2.6 Hubungan Sistem Pengendalian Memoderasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

*Good Governance* menghendaki pemerintahan yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas,

dan partisipasi. Sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara (Fherdifha & Sari, 2012).

*Good Governance* merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu organisasi karena termuat akuntabilitas dan transparansi didalamnya. *Good Governance* cenderung meningkat apabila pelaksanaan pengendalian internal dan penerapan total kualitas manajemen diterapkan secara optimal, dan pengendalian internal memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap *Good Governance* (Jefri, 2018).

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang dikembangkan untuk penelitian, 2021

Kerangka pemikiran pada gambar 2.2 memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai variabel dependen (variabel terikat) diduga akan dipengaruhi oleh variabel independen lainnya berupa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan *Good*

*Governance*. Kerangka pemikiran pada gambar 2.2 juga menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel moderasi dimana penerapan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance* serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah.

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan hasil teori penelitian terdahulu yang dipaparkan serta kerangka pemikiran maka peneliti menentukan hipotesis ini adalah :

### **2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Hal ini agar pengguna informasi mampu memahami informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat.

Penelitian Mahardini & Miranti (2018) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Diperkuat dengan penelitian Ikriyati & Aprila (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten

Selama. Hasil ini sejalan pula dengan penelitian Sako & Lantowa (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rohmah *et al.* (2020) diperoleh hasil bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP akan menghasilkan informasi yang komprehensif sehingga tingkat keterandalan dan relevansi laporan keuangan semakin tinggi (Jati, 2019). Maka semakin baik penerapan SAP akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Yanti, 2020).

*H1 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.*

#### **2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Salah satu produk yang dihasilkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi pemerintah daerah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan disajikan dengan penerapan disiplin ilmu akuntansi dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang berkompeten dibidangnya. Sumber daya manusia yang unggul akan berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai

dengan standar yang ditentukan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan menyandang predikat terbaik dalam artian berkualitas.

Diperkuat dengan hasil penelitian Irafah *et al.* (2020) bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Zai *et al.* (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara hubungan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Jika sumber daya manusia berkompoten dalam mengoperasikan sistem maka proses penyusunan laporan keuangan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga penyampaian waktu pelaporan keuangan akan tepat waktu serta hasil laporan keuangan yang disajikan berkualitas (Irafah *et al.*, 2020). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM memiliki pola hubungan dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

H2: *Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah*

#### **2.4.3 Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemerintah berupaya menerapkan sistem pemerintahan yang baik. *Good Governance* menghendaki pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini juga dilakukan demi terciptanya *legal and political framework*. Ketika tata kelola pemerintah daerah sudah baik maka akan berdampak pada terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dimana didalamnya

termuat nilai relevan dan reliabilitas yang membuat informasi keuangan berguna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian dari Maramis *et al.* (2018) semakin baik penerapan *Good Governance* maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Hosana *et al.* (2021) menunjukkan pola signifikan positif antara penerapan *Good Governance* dengan kualitas laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *Good Governance* (Philadelphiah *et al.*, 2020). Penerapan *Good Governance* yang baik juga akan mempermudah dalam proses pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

H3: *Good Governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah*

#### **2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan hal penting karena berguna sebagai sistem kontrol pada suatu instansi. Dengan menerapkan SPIP dalam tata kelola keuangan diharapkan dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari penerapan SAP sehingga menghasilkan output berupa LKPD yang berkualitas.

H4: *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi pengaruh signifikan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

#### **2.4.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Tujuan utama dari SPIP ini yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi. Oleh karena itu akan mendorong pemakaian sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar tercapai sasaran dan tujuan organisasi. Tentunya dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan didukung juga dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

*H5: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

#### **2.4.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

*Good Governance* merupakan sistem dimana pemerintahan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Salah satu cara mengukur kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari penerapan *Good Governance*. *Good governance* meningkat jika Sistem Pengendalian Internal diterapkan secara optimal. Hal ini menandakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam tata kelola keuangan pemerintah memiliki kontribusi yang besar untuk tercapainya *Good Governance* yang akan menghasilkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik.

H6 : *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi pengaruh signifikan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.*

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

1. Rahmawati *et al.*, (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dan variabel independen yaitu penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi dan SPI. Dengan responden yaitu kepala bagian akuntansi di 37 SKPD dan metode pengambilan sampel yaitu sampel jenuh. Diperoleh hasil variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Nike Yusnita Mahardini & Miranti, (2018) dengan judul penelitian “Dampak Penerapan SAP dan Kompetensi SDM Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 82 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji

reliabilitas dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 23.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan; 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.

3. Ikriyati & Aprila (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Seluma”. Populasi penelitian ini yaitu bagian pengelola keuangan SKPD Kabupaten Seluma yang terdiri dari 26 SKPD. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan sampel yaitu kasubang keuangan dan bidang perencanaan.

Teknik analisis data yaitu menggunakan statistik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pebriani (2019) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel moderasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran Audit Internal secara parsial maupun bersama-sama terhadap kualitas LKPD dan pengaruhnya yang dimoderasi oleh SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan survey eksplanatori dengan ukuran sampel 108 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda dengan pengujian variabel moderasi menggunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*) dan pengolahan data menggunakan *software* SPSS 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran Audit Internal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LKPD, namun secara parsial penerapan SAP tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian secara moderasi variabel peran audit internal yang dimoderasi oleh SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Kesimpulan penelitian ini berhasil menemukan bahwa untuk meningkatkan kualitas LKPD studi kasus pada OPD di Kabupaten Banyuasin, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan terhadap SPIP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD, pemerintah perlu meningkatkan kualitas audit internal guna meningkatkan peran pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan revidi laporan keuangan sehingga mampu bekerja secara profesional, obyektif dan independen.

5. Philadelphia *et al.*, (2020) dengan judul penelitian “*The Effect Of Human Resources Competency, Government Accounting Standards, Good Governance, and Internal Control Systems On The Quality Of Local Government Financial Statements*”. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan daerah setiap SKPD yaitu sub bagian keuangan beserta staf.

Penelitian ini menggunakan metode *sensus sampling* dengan 95 responden pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 20. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, dan *good governance* mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Zai *et al.*, (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Government Governance (GGG)* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan di BPKPAD Kabupaten Nias Barat”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan menggunakan sensus dalam mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan kuesioner yang diberikan kepada seluruh pegawai BPKPAD kabupaten Nias Barat.

Jumlah seluruh pegawai BPKPAD Kab. Nias Barat sebanyak 50 orang. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Dari 50 kuesioner yang dibagikan, hanya 47 kuesioner yang dapat diolah. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa GGG memengaruhi signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Secara bersama-sama GGG dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan kualitas informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat.
7. Sumaryati *et al.* (2020) dengan judul penelitian “*Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia*”. Total sampel pada penelitian ini 106 responden dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Dengan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan sistem informasi akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa pentingnya kompetensi sumber daya manusia untuk mengembangkan kualitas dari laporan keuangan daerah.

8. Rohmah *et al.*, (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota malang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah di BPKAD Kota Malang, berjumlah 69 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik Purposive Sampling. Sampel yang dipilih sebanyak 42 responden. Data diambil dengan menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20 (Produk Statistik dan Solusi Layanan versi 14). Data uji yang digunakan adalah uji hipotesis simultan (F), koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), dan uji hipotesis parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji parsial tiga variabel memiliki pengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (sig = 0,002), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (sig = 0,031) dan sistem pengendalian internal (sig = 0,000) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung ke sumber utama. Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan untuk kualitatif) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data primer peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dengan teknik penyebaran kuesioner (angket) kepada responden yang dituju. Kuesioner (angket) merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran skala Likert. Proses dalam pengukuran model skala Likert yaitu variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menggunakan skala Likert dengan ukuran sebagai berikut: Sangat Setuju = diberi skor 5; Setuju = diberi skor 4; Ragu-ragu/Netral = diberi skor 3; Tidak Setuju = diberi skor 2; Sangat Tidak Setuju = diberi skor 1. Instrumen tersebut dibuat dalam bentuk pilihan ganda.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu berjumlah 41 SKPD terdiri dari 22 (dua puluh dua) Dinas, 7 (tujuh) Badan, 2 (dua) Rumah Sakit, 9 (sembilan) Biro, dan Sekretariat.

#### **3.4.2 Sampel**

Menurut penjelasan dari Siyoto & Sodik (2015) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini kriteria sampel yang ditetapkan adalah pegawai SKPD di Provinsi

Kepulauan Riau yang terlibat langsung dengan pengelola laporan keuangan. Yaitu tiga orang tiap SKPD terdiri dari PPK, bendahara dan staf penatausahaan keuangan sebanyak 123 responden.

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Jumlah Sampel Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Sampel
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 orang
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 orang
3	Inspektorat	3 orang
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3 orang
5	Dinas Kebudayaan	3 orang
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 orang
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3 orang
8	Dinas Sosial	3 orang
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 orang
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	3 orang
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3 orang
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 orang
13	Dinas Perhubungan	3 orang
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3 orang
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan	3 orang
16	Dinas Kesehatan	3 orang
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3 orang
18	Dinas Pendidikan	3 orang
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 orang
20	Dinas Perumahan dan Pemukiman	3 orang
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 orang
22	Dinas Pariwisata	3 orang
23	Biro Organisasi dan KOPRI	3 orang
24	Biro Umum	3 orang
25	Biro Administrasi Pembangunan	3 orang
26	Biro Layanan Pengadaan	3 orang

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Sampel
27	Biro Administrasi Perekonomian	3 orang
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	3 orang
29	Biro Hukum	3 orang
30	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	3 orang
31	Biro Humas Protokol dan Penghubung	3 orang
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	3 orang
33	Badan Perencanaan dan Litbang	3 orang
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3 orang
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 orang
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3 orang
37	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3 orang
38	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	3 orang
39	Rumah Sakit Umum Daerah	3 orang
40	Rumah Sakit Umum Tanjunguban	3 orang
41	Sekretariat DPRD	3 orang
	Total	123 orang

Sumber: Portal Kepriprov dan data diolah

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dijelaskan secara rinci dalam tabel 3.2

**Tabel 3. 2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Pengukuran
<b>Y</b>	Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun	1.Relevan 2.Andal 3.Dapat Dibandingkan 4.Dapat Dipahami (Peraturan	1,2,3,4	<i>Skala Likert</i>

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Pengukuran
	2010).	Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pujainara (2017)).		
<b>X1</b>	Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	1. Basis Akuntansi 2. Nilai Historis 3. Realisasi 4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal 5. Periodisitas 6. Konsistensi 7. Pengungkapan lengkap 8. Penyajian wajar  (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun	1,2,3,4,5,6,7  ,8,9,10,11	<i>Skala Likert</i>

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Pengukuran
		2010).		
<b>X2</b>	Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara).	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Perilaku (Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam Wardani (2017)).	1,2,3,4,5,6,7 ,8	<i>Skala Likert</i>
<b>X3</b>	<i>Good Governance</i> merupakan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk	1. Partisipasi 2. <i>Rule of Law</i> 3. Transparansi 4. Responsif 5. <i>Consensus orientation</i> 6. Equity 7. Efisiensi dan Efektivitas	1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,12 ,13,14,15,16 ,17,18	<i>Skala Likert</i>

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Pengukuran
	mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat ( <i>United Nations Development Program</i> ).	8. Akuntabilitas 9. Strategic Vision <i>(United Nations Development Program dalam D Widyaningsih (2019))</i> .		
<b>Z</b>	SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan <i>(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008</i>	1,2,3,4,5,6,7 ,8,9	<i>Skala Likert</i>

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Pengukuran
	(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008).	dalam Wardani (2017)..		

Sumber : Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian ini, pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2019) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pemberian skor pada setiap item pernyataan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap jawaban yang sangat setuju (SS) = 5
- b. Setiap jawaban setuju (S) = 4
- c. Setiap jawaban netral (N) = 3
- d. Setiap jawaban tidak setuju (TS) = 2
- e. Setiap jawaban sangat tidak setuju (STS) = 1

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Ketika data mentah sudah didapat maka selanjutnya data tersebut diolah kembali. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan SPSS 22 dengan beberapa bentuk seperti tahap pengeditan, coding, *data entry* , tabulasi data, processing, dan *cleaning* data (Masturoh & T. Anggita, 2018).

#### 3.6.1 Pengeditan (*Editing*)

Tujuan dilakukan pengeditan untuk meminimalisir kesalahan kemungkinan data yang tidak sesuai kebutuhan serta menghilangkan kesalahan dan melengkapi

kekurangan pada data mentah. Secara umum pengeditan dapat dikatakan proses mengkoreksi data yang telah dikumpulkan.

### **3.6.2 Pemberian Kode (*Coding*)**

Pemberian kode dapat berupa huruf, angka, maupun simbol pada data mentah. Dalam pemberian kode harus sesuai dengan kaidah-kaidah skala pengukuran yang digunakan

### **3.6.3 Data Entry**

Mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengukuran skala *likert* yaitu pemberian skor atas jawaban dari responden.

### **3.6.4 Tabulasi (*Tabulating*)**

Ketika data sudah didapat maka dilakukan pengelompokan dengan menggunakan tabel sesuai dengan kategori yang dianalisis.

### **3.6.5 Processing**

Proses setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar serta telah dikode jawaban responden pada kuesioner kedalam aplikasi pengolahan data di komputer.

### **3.6.6 Cleaning Data**

Pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat memasukkan data.

## **3.7 Teknik Analisis Data**

### **3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2019) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam statistik deskriptif dapat dilakukan dengan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, analisis regresi untuk melakukan prediksi, dan meng*compare* data sampel atau populasi.

### **3.7.2. Uji Kualitas Data**

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan dan tingkat keabsahan yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

#### **3.7.2.1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $r$  hitung positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid.
- b. Jika  $r$  hitung negatif dan  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir pernyataan tersebut tidak valid

### 3.7.2.2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner reliabel atau andal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pernyataan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0.60.

### 3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Puspitaningtyas (2015), uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bahwa model regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen telah memenuhi asumsi klasik sehingga model regresi yang terbentuk dapat disimpulkan sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bias.

Jadi asumsi klasik dilakukan hanya pada analisis regresi linier berganda sedangkan analisis regresi linier sederhana tidak ada prasyarat uji asumsi klasik. Jika data penelitian adalah data cross section (penelitian hanya satu periode) maka uji asumsi klasik yang digunakan ialah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas.

### 3.7.3.1. Uji Normalitas

Menurut Puspitaningtyas (2015), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari variabel residual ( $e$ ) dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Diharapkan dalam model regresi yang baik data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, data residual menyebar mengikuti distribusi normal dengan nilai mean sebesar 0 (nol).

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikansi dengan pedoman pengambilan keputusan berikut

- a. Nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  5% ( $\text{sig.} < 0,05$ ), data residual tidak terdistribusi secara normal.
- b. Nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  5% ( $\text{sig.} > 0,05$ ), data residual terdistribusi secara normal.

### 3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Puspitaningtyas (2015), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang bermakna atau korelasi yang tinggi di antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa berdasarkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari collinearity statistics, dengan pedoman pengambilan keputusan berikut :

- a. Nilai *tolerance* lebih besar dari 10% ( $\text{tolerance} > 0,1$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $\text{VIF} < 10$ ), tidak ada korelasi antar variabel independen
- b. Nilai *tolerance* lebih kecil dari 10% ( $\text{tolerance} < 0,1$ ) dan nilai VIF lebih besar dari 10 ( $\text{VIF} > 10$ ), ada korelasi antar variabel independen.

Maka dapat diketahui bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 10% (*tolerance* > 0,1) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (VIF < 10). Artinya tidak ada korelasi antar variabel independen.

### 3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Puspitaningtyas (2015), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel independen dengan variabel residual (*e*). Diharapkan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sebab adanya gejala heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel independen lebih menjelaskan variabel residual dari pada variabel dependen.

Hasil uji heteroskedastisitas, berdasarkan uji korelasi *rank-spearman* dengan pedoman pengambilan keputusan berikut

- a. Nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  5% (sig. < 0,05) terjadi heteroskedastisitas
- b. Nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  5% (sig. > 0,05) tidak terjadi heteroskedastisitas

### 3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Rumusan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan  
 $\alpha$  : Konstanta  
 X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  
 X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia  
 X3 : *Good Governance*  
 $\beta 1-\beta 3$  : Koefisien regresi berganda  
 e : Error

### 3.7.5 Analisis Regresi Moderasi dengan Uji Interaksi

Ghozali (2018) *Moderated Regression Analysis (MRA)* menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu dilakukan pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)* melalui pendekatan uji interaksi. Adapun Langkah uji interaksi dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * X_4 + \beta_5 X_2 * X_4 + \beta_6 X_3 * X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan  
 $\alpha$  : Konstanta  
 X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  
 X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia  
 X3 : *Good Governance*  
 X4 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
 X1\*X4 : Interaksi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

$X2*X4$  : Interaksi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

$X3*X4$  : Interaksi antara *Good Governance* dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

$\beta1- \beta6$  : Koefisien Regresi

### **3.7.6. Uji Hipotesis**

#### **3.7.6.1.Uji Signifikasi Parameter Individual (uji t)**

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial dari masing-masing indikator. Penerimaan dan penolakan hipotesis apabila,

1. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### **3.7.6.2.Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R) menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, atau sejauh mana kontribusi variabel mempengaruhi variabel dependen.

Ciri-ciri nilai R adalah:

1. Besar nilai koefisien determinasi antara (nol) dan (satu).
2. R yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
3. Nilai mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ikonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum se-Nusa Tenggara Barat). *Valid Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.35748>
- Anggara, S. (2016). Ilmu Adminstrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Azlim, Dawarnis, & Abu Bakar, U. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Bada Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 1–14.
- BPK. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*.
- Ferri, S., Rahayu, S., & Yudi. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 5(4), 268–279.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. *M. Ali Fikri Biana Adha Inapty Rr. Sri Pancawati Martiningsih*, 53(9), 1689–1699.
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.21070>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Hosana, A. T., Rispanyo, & Widarno, B. (2021). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Karanganyar). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(1). <https://doi.org/10.33061>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369>

Inapty, Biana, M. A. F., & Pancawati, R. S. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 27–42.

Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413.

Indonesia, R. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*.

*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Internal dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern*. (2014).

Irafah, S., Sari, E. N., Akuntansi, P. M., Ekonomi, F., & Muhammadiyah, U. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348. <https://doi.org/10.17509>

Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591>

Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.

Junyantara, I. G., & Samtika Putra, I. P. D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar.

Kementerian Keuangan. (2020). Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020: Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://www.kemenkeu.go.id/>, September, 1.

Kesuma, D. P., Anwar, C., & Darmansyah. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*, 1(2), 141–146.

Mahardini, Nikke Yusnita, & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran

2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Maramis, M. M., Morasa, J., & Wokas, H. R. . (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, 13(3), 563–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400>
- Masturoh, I., & T. Anggita, N. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014>
- Nuraini, Kirmizi, & Kamaliah. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *Pekbis*, 11(3), 210–220.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–15.
- Ompusunggu, S. G. (2020). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 72–80. <https://doi.org/10.31506>
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55. <https://doi.org/10.36982>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern*
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). The Effect Of Human Resources Competency, Government Accountings Standards, Good Governance, And Internal Control Systems On The Quality Of Local

- Government Financial Statements. *Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.52490>
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(2), 128–139. <https://doi.org/10.35800>
- Puspitaningtyas, Z. (2015). *Prediksi Risiko Investasi Saham*. Griya Paandiva.
- Putri, E. M. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Implementasi Sistem e-Procurement.
- Putu, N., Merta, Y., Sari, M., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). ( SAP ) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana ). 2(1).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>
- Redjo, P. R. D. (2020). Pengendalian internal sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi sdm terhadap kualitas lkpd kabupaten ttu. *EkoPem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 12–20. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Derah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 43–51.
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Abstrak Pendahuluan Pencapaian kinerja sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan. *Journal Of Accounting Science*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101>
- Santoso, S. (2014). *SPSS 22 From Essential to Expert Skills*. PT Elax Media Komputindo.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan 1). Literasi Media Publishing.
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040>

- Sudaryati, D., & Heriningsih, S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Akuntansi AkruaL Dengan Perangkat Pendukung Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.12928>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (Edisi Kedua). ALFABETA.
- Sumaryati, A., Novitasari Praptika, E., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in IndonesiaNo Title. *Journal of Asian Finance*, 7(10), 795–802. <https://doi.org/10.13106>
- Trisulo. (2017). *Beberapa Konsep Keuangan Negara dalam Tata Cara Pembayaran Menggunakan APBN Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012*.
- Triwardana, D. (2017). The Influence Of Implementing Accounting Government Standard , Implementing Of Accounting Financial System *JOM Fekon*, 4(1).
- Wulandari, M. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok . 2(Agustus), 6*.
- Yanti, N. S. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah , Pemanfaatan Sistem Informasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada OPD Kota Malang )*. 8(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067>
- Zai, F. P., Purba, S., Si, M., Nainggolan, A., & Sc, M. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Informasi Laporan Keuangan ( Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat ). *Mutiara Akuntansi*, 5(1), 1–10.

**CURRICULUM VITAE**



**A. PERSONAL INFORMATION**

Full Name : Putri Dwi Rahmadani  
Gender : Female  
Place and Date of Birth : Tanjungpinang, July 27<sup>th</sup> 2000  
Citizen : Indonesia  
Age : 22 years old  
Present Address : Jl Taman Bahagia No 45, Tanjungpinang  
Religion : Islam  
Email : [putridwirahmadanipdr@gmail.com](mailto:putridwirahmadanipdr@gmail.com)  
Phone Number / WA : 082361167049

**B. EDUCATIONAL INFORMATION**

TYPE OF SCHOOL	NAME OF SCHOOL	NO. OF YEAR COMPLETED
Elementary School	SDN 002 Tanjungpinang Barat	2012
Junior High School	SMPN 1 Tanjungpinang	2015
Senior High School	SMAN 1 Tanjungpinang	2018
University	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2022